

**PRAKTIK PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DALAM  
RUANG LINGKUP KELUARGA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun Oleh:**

**FEITMILA RIMADANA**  
**C100120090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**


**PRAKTIK PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DALAM  
RUANG LINGKUP KELUARGA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)**

Yang ditulis oleh:

**FEITMILA RIMADANA**  
**C100120090**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



**(Muchamad Iksan, S.H., M.H)**

Pembimbing II



**(Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn, M.H)**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DALAM  
RUANG LINGKUP KELUARGA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)**

Yang ditulis oleh:

**FEITMILA RIMADANA**  
**C100120090**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 9 Mei 2016....  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H., M.H.

Sekretaris : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn., M.H.

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 02 Mei 2016

Penulis



**FEITMILA RIMADANA**  
C100120090

**PRAKTIK PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DALAM  
RUANG LINGKUP KELUARGA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)**

Feitmila Rimadana  
C100120090  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
feitmilarimadana@gmail.com

**ABSTRAK**

Pencurian dalam lingkup keluarga merupakan delik aduan yang hanya dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan pihak keluarga terhadap pelaku pencurian dalam ruang lingkup keluarga sendiri yang tidak melaporkan kepada pihak berwenang, untuk mengetahui pertimbangan dan konsekuensi dari pihak Penyidik Kepolisian apabila terdapat kasus pencurian dalam lingkungan keluarga yang sudah diadukan, tetapi tiba-tiba dicabut oleh pihak keluarga, dan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.Kray. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa pertimbangan untuk tidak melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang, yaitu sebagai berikut bersedia mengganti kerugian, pelaku pencurian merupakan tulang punggung keluarga, masih terdapat hubungan keluarga, dan korban merasa iba dengan keadaan ekonomi pelaku. Konsekuensi pihak Kepolisian terhadap adanya pencabutan aduan didasarkan atas permintaan dari korban masih terdapat hubungan keluarga, maka pihak Kepolisian tidak dapat melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan penuntutan atas perkara tersebut. Hakim dalam menjatuhkan perkara pidana berdasar pertimbangan yuridis yakni fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan sosiologis yakni memperhatikan aspek dari segi faktor berat-ringannya hukuman sebagaimana yang tercantum dalam bunyi dari Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

**Kata kunci:** *tindak pidana pencurian, keluarga, pencabutan aduan*

**ABSTRACT**

Theft within the scope of the family is to a complaint that the prosecution can only be done if there is a complaint from the victim or aggrieved. This study aims to determine the consideration of the families of the perpetrators of the theft within the scope of the family themselves were not reported to the authorities, to determine the consideration and the consequences of the Investigator Police if there are cases of theft within the family that have been lodged, but suddenly revoked by the family, and basic consideration of the judge in examining and deciding criminal case of theft committed within the scope of the family in Karanganyar District Court's Decision No. 124 / Pid.B / 2013 / PN.Kray. The research method using descriptive empirical jurisdiction. Sources of primary data, interviews and secondary data sources of primary law, secondary and tertiary. Data were collected by interview and literature study then analyzed the data qualitatively. The results showed that there are several reasons for not reporting the case to the appropriate authorities, as follows indemnify, theft perpetrators are the backbone of the family, there are family relationships, and the victim felt pity to economic circumstances the offender. Consequences of the police against the revocation of the complaint was based on the request of the victim is still a family relationship, then the police may not assign the case file to the prosecutor, so that the public prosecutor can not prosecute the case. The judge in imposing a criminal case based on juridical considerations the facts revealed at the hearing and sociological considerations in considering the aspect of a factor in terms of the severity of the punishment, as stated in the sound of Article 197 paragraph (1) f the KUHP.

**Keywords:** *the crime of theft, families, revocation complaint*

## PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Bab XXII Buku Kedua KUHP dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan pencurian itu merupakan *delict* yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil”.<sup>1</sup> Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Menurut Cleiren, mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud. Ada maksud untuk memiliki.<sup>2</sup> Maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”.

Apabila pencurian itu dilakukan oleh anggota keluarga, baik dalam garis lurus ke bawah maupun dalam garis samping sampai tingkat kedua, tuntutan terhadap mereka ini hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh pihak yang dirugikan.<sup>3</sup> Jenis pencurian tersebut termasuk ke dalam golongan *geprivilegieerde diefstal* (delik aduan) dan diatur di dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengingat tujuan dari dirumuskannya delik aduan dalam KUHP adalah karena kepentingan pihak lain dalam hal tertentu (misalnya korban atau keluarga lebih diutamakan daripada tujuan perlindungan masyarakat atas suatu tindakan penuntutan), maka tidak dapat dipungkiri ada kalanya pertimbangan yang panjang dibutuhkan untuk memutuskan apakah suatu tindak pidana dituntut atau tidak. Hal

---

<sup>1</sup>P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, hal. 49.

<sup>2</sup>Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 100-101.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 105-102.

ini menjadi suatu pertimbangan di samping hal lain yang diperhitungkan pada masa lalu, di mana korban atau keluarganya tidak serta merta menyadari bahwa ia telah menjadi korban dari suatu tindak pidana pada saat perbuatan dilakukan.<sup>4</sup>

Terkait dengan hal di atas, setelah dilakukannya tindakan pengaduan kepada yang berwajib, maka aduan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini yang menjadikan delik aduan berbeda dengan delik bukan aduan. Dalam jenis delik yang bukan aduan, suatu perkara pidana diproses oleh petugas penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, maka menjadi otoritas penegak hukum untuk melakukan tindakan penuntutan atas perkara itu.<sup>5</sup> Dalam Pasal 75 KUHP, hal ini dirumuskan sebagai “*Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.*”

Mengenai ketentuan umum tersebut di atas, ada pula ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 (ayat) 4 KUHP, bahwa dalam hal penarikan kembali pengaduan dapat dilakukan sewaktu-waktu, selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.<sup>6</sup>

Sesungguhnya, pencabutan aduan ini mengandung konsekuensi bagi penuntut umum dalam melakukan kewenangannya. Adapun konsekuensi yang dimaksud adalah bahwa (1) Dengan adanya pencabutan aduan, maka penuntut umum hilang kewenangannya untuk melakukan penuntutan, (2) Bila sudah dilakukan proses pengajuan dakwaan dalam sidang pengadilan, maka dakwaan dicabut; dan (3) Bila dakwaan dilanjutkan, maka hakim wajib memutuskan untuk menghentikan proses tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Eva Achjani Zulfa, 2013, *Gugurnya Hak Menuntut (Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana)*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 10.

<sup>5</sup>*Loc.Cit.*

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, 1984, *Hukum Pidana II Sari Kuliah*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 58.

<sup>7</sup>Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak..., Loc.Cit.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dari pihak keluarga pelaku pencurian dalam ruang lingkup keluarga itu sendiri yang tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang, untuk mengetahui pertimbangan dan konsekuensi dari pihak Penyidik Kepolisian (Polres Karanganyar) apabila terdapat kasus pencurian dalam lingkungan keluarga yang sudah diadukan akan tetapi tiba-tiba dicabut oleh pihak keluarga, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.Kray?

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Pihak Keluarga Pelaku Pencurian dalam Ruang Lingkup Keluarga yang Tidak Melaporkan Kasus Kepada Pihak yang Berwenang**

Terdapat dua (2) kasus pencurian dalam ruang lingkup keluarga yang tidak melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang. Berdasar pertimbangan pihak keluarga dalam kasus yang pertama dapat disimpulkan, bahwasannya kedua belah pihak baik korban maupun pelaku sepakat untuk tidak melaporkan kasus pencurian dalam keluarga tersebut kepada pihak yang berwenang, antara lain karena dari pihak pelaku bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh korban berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pengembalian BPKB sepeda motor Honda Supra AD-3001-DZ. Pertimbangan lainnya, yakni pelaku juga merupakan tulang punggung keluarganya. Maka dari



itu, pihak keluarga menyetujui saran yang telah diberikan oleh Perangkat Desa/Kepala Dusun setempat agar kasus pencurian dalam keluarga yang dialami oleh korban tersebut lebih baik diselesaikan secara musyawarah/mediasi saja.

Kasus yang kedua, diketahui bahwa pertimbangan pihak keluarga tidak melaporkan kasus pencurian dalam keluarga tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu *pertama*, korban merasa malu jikalau kasus tersebut sampai di proses ke Pengadilan karena nantinya masyarakat akan mengetahuinya, sebab antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan kekeluargaan yang sangat dekat yang ditakuti jika perkara tersebut sampai diproses ke Pengadilan maka akan menimbulkan dendam dan perpecahan. *Kedua*, korban juga merasa iba dengan keadaan ekonomi pelaku yang cukup memprihatinkan.

Berdasarkan hasil penelitian 2 (dua) kasus pencurian dalam keluarga tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pertimbangan ataupun alasan mengapa pihak keluarga khususnya korban tidak melanjutkan perkaranya sampai ke Pengadilan. Secara umum dari hasil wawancara penulis di atas, pertimbangan antara kasus yang pertama dengan yang kedua berbeda. Dalam kasus yang pertama, pihak keluarga sepakat untuk menyelesaikan kasusnya secara musyawarah kekeluargaan saja atau yang biasa disebut dengan mediasi dengan memenuhi hak korban dalam bentuk ganti kerugian dengan sejumlah uang atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh korban.

Pertimbangan dalam kasus yang kedua, antara lain bahwa pihak keluarga merasa iba dengan pelaku serta malu jika kasus tersebut sampai diketahui orang banyak karena antara pihak korban dengan pelaku masih terdapat hubungan keluarga yang sangat dekat, yakni 1 (satu) kakek/mbah. Pada umumnya, Perangkat Desa/Kepala Dusun setempat ketika mengetahui bahwa di lingkungannya telah terjadi kasus pencurian dalam keluarga biasanya akan memberikan bantuan dan bertindak sebagai mediator untuk mewakili kepentingan

kedua belah pihak keluarga pencurian, baik korban maupun pelaku. Ada 2 (dua) kemungkinan yang timbul, yaitu yang pertama keluarga korban bisa menerima ajakan untuk menyelesaikan masalah antara pelaku dengan korban secara damai diluar prosedur hukum pidana. Yang kedua, pihak keluarga korban tidak mau menerima adanya penyelesaian secara damai diantara pelaku dan korban, sehingga pihak keluarga korban tetap menginginkan penyelesaian melalui jalur hukum pidana. Dalam posisi seperti ini, Perangkat Desa/Kepala Dusun yang berperan sebagai mediator dapat mengajak secara bersama-sama dari pihak korban dan pihak pelaku untuk berusaha menyelesaikan persoalan antara pelaku dengan korban secara damai.

**Pertimbangan dan Konsekuensi Pihak Penyidik Kepolisian (Polres Karanganyar) Apabila Terdapat Kasus Pencurian dalam Lingkungan Keluarga yang Sudah Diadukan Akan Tetapi Tiba-Tiba Dicabut oleh Pihak Keluarga**

Menurut hasil penelitian, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir hanya terdapat 2 (dua) kasus saja yang dilanjutkan sampai ke Pengadilan, diketahui juga terdapat pula 3 (tiga) kasus yang sudah diadukan namun dicabut oleh pihak keluarga. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam permasalahan terhadap pihak Penyidik Kepolisian (Polres. Karanganyar), baik itu mengenai pertimbangan maupun terkait dengan konsekuensi terhadap pencabutan aduan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui pertimbangan dan konsekuensi dari pihak Penyidik Kepolisian (Polres. Karanganyar), diambil data dari aparat penegak hukum yang pernah menangani kasus pencurian dalam lingkungan keluarga yang sudah diadukan akan tetapi tiba-tiba dicabut oleh pihak keluarga.

Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) KUHP bahwa kasus pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan yang hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan. Hal tersebut disebabkan oleh karena pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan relatif, dimana perbuatan

pencurian tersebut sebenarnya delik biasa, akan tetapi karena dilakukan dalam ruang lingkup keluarga maka untuk penuntutannya mengharuskan adanya syarat pengaduan. Sehingga, pihak korban dapat mencabut kembali aduannya apabila telah melakukan perdamaian dengan pelaku. Delik aduan karena sifatnya masih ada hubungan keluarga. Biasanya jika ada pengaduan dari korban, pihak Penyidik Kepolisian tetap menindaklanjuti selama aduan tersebut belum dicabut.<sup>8</sup>

Pertimbangan mengenai pihak korban dapat mencabut kembali aduannya apabila telah melakukan perdamaian dengan pelaku, ini membuktikan bahwa walaupun perkara tersebut merupakan perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara korban dengan pelaku jauh lebih besar manfaatnya bila dibandingkan perkara tersebut tetap dilanjutkan. Pencabutan aduan yang terjadi pada kasus pencurian dalam keluarga didasarkan pada keadaan korban yang merasa ingin menyelamatkan kehormatan keluarganya. Faktor kehormatan keluarga yang membuat korban memilih tidak melanjutkan kasus pencurian yang mereka alami, korban cenderung mencabut aduannya dengan pertimbangan keluarga mereka bisa terselesaikan dari dampak yang lebih buruk seperti timbulnya dendam dan perpecahan.

Pencabutan aduan yang dilakukan oleh pihak keluarga pelaku pencurian dalam keluarga itu sendiri biasanya didasari atas kesadaran bahwa mereka masih dalam hubungan keluarga dan akibat yang ditimbulkan dari proses hukum yang dilanjutkan hingga ke Pengadilan dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut, serta untuk menghindari adanya dendam di dalam keluarga. Selain itu, juga berdasarkan pada permintaan dari pihak korban yang hanya ingin memberikan suatu kesempatan kepada pelaku, sehingga dengan dilakukannya pencabutan terhadap aduan

---

<sup>8</sup>Tri Gusnadi, Kepala Bagian Operasional Reskrim, Kepolisian Resort Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Senin 29 Februari 2016, Pukul 10.35 WIB.

tersebut, pelaku diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana pencurian dalam keluarga. Pertimbangan pihak Kepolisian lainnya juga untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di Pengadilan karena berkas perkara di Pengadilan sudah banyak, jika setiap perkara dilimpahkan ke Pengadilan maka akan semakin banyak berkas perkara di Pengadilan yang tertunda, sedangkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar setiap harinya pasti terjadi kejahatan.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui apabila delik aduan sudah dicabut maka kasusnya tidak dapat dilanjutkan atau dikatakan selesai. Dicabut pada tiap-tiap pemeriksaan, dalam arti di Kepolisian, Kejaksaan, maupun sampai tingkat Pengadilan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Karena apabila dicabut dan selesai maka dianggap bermanfaat, sebab mencari keadilan tidak harus sampai pada tingkat Pengadilan. Artinya, selama masing-masing sudah merasa adil dan merasa bisa diselesaikan, maka aduan tersebut dapat dicabut. Sudah dicabut disini tentunya pihak Penyidik Kepolisian tidak dapat melanjutkan perkaranya sampai ke Pengadilan. Pencabutan aduan tersebut pada dasarnya tidak membawa dampak/akibat hukum kepada proses pemeriksaan perkaranya.<sup>10</sup>

Penarikan aduan yang dimaksud dapat dikatakan sebagai penghalang bagi penuntutan, dikarenakan hak Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan otomatis akan lenyap. Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan harus menarik kembali dakwaan yang (sudah) diajukan, serta juga mencabut kembali penahanan sementara yang sudah dijatuhkan. Bila tetap terus melanjutkan dakwaan, hakim akan menyatakan tidak dapat diterimanya penuntutan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Tri Gusnadi, Kepala Bagian Operasional Reskrim, Kepolisian Resort Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Senin 29 Februari 2016, Pukul 10.40 WIB.

<sup>10</sup>Tri Gusnadi, Kepala Bagian Operasional Reskrim, Kepolisian Resort Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Senin 29 Februari 2016, Pukul 10.45 WIB.

<sup>11</sup>Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 423.

Dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan juga dari literatur, selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga pada umumnya lebih mengutamakan kesepakatan antara para pihak, baik korban maupun pelaku. Hal tersebut dilakukan karena hendaknya setiap korban tindak pidana pencurian dalam keluarga harus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai baik buruknya akibat yang akan diterima jika perkara tersebut sampai diproses ke Pengadilan. Sebagaimana demikian, agar dalam penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi perpecahan dalam keluarga yang pada nantinya dapat menimbulkan dendam yang mendalam dalam suatu keluarga.

**Dasar Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.Kray.**

Contoh kasus yang penulis teliti dan analisis merupakan tindak pidana pencurian dalam keluarga yang terjadi pada bulan Mei 2013 yang berkasnya telah masuk ke persidangan, yaitu sebagai berikut: (1) Terdakwa bernama Ujang Ahmad bin Kende, (2) Posisi Kasusnya yaitu Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah mertua terdakwa (saksi Marwoto) di Dk. Kepabron RT.02/04 Ds.Karangpandan Kab.Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu berupa kalung dengan liontin berbentuk kura-kura dan 1 (satu) buah cincin lintring susun tiga emas putih bermata berlian 16 (enam belas) biji milik saksi Tri Handayani Pertiwi (ibu mertua terdakwa); (3) Tuntutannya: (a) Menyatakan terdakwa Ujang Ahmad Bin Kende terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu; (b) Menghukum terdakwa Ujang Ahmad

Bin Kende dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan; (c) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah cincin lintring susun tiga emas putih bermata berlian 16 biji dikembalikan kepada saksi Tri Handayani Pertiwi, SE; (d) Menyatakan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); (4) Putusannya: (a) Menyatakan terdakwa Ujang Ahmad Bin Kende telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keluarga”; (b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; (c) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (d) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; (e) Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin lintring susun tiga emas putih bermata berlian 16 biji dikembalikan kepada saksi Tri Handayani Pertiwi, SE; (f) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), (5) Pertimbangan hakim: Hal-hal yang memberatkan: (a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, (b) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Hal-hal yang meringankan: (a) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, (b) Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan yang dibuat hakim apabila dikaitkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata lebih ringan. Dalam suratuntutannya, perbuatan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan pelanggaran Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kesatu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama berada di tahanan, sedangkan dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atau lebih ringan 2 (dua) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Apabila dikaji secara mendalam, tentunya

terdapat pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis yang mendasari untuk dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meliputi diri terdakwa. Tentunya hal-hal yang meringankan dan memberatkan inilah yang nantinya dijadikan tolak ukur dalam menjatuhkan pidana. Bukan berarti semata-mata hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, namun disisi lain hakim juga harus memperhatikan asas keadilan.<sup>12</sup>

Keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang (*let'erknechten der wet*), menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum *powerfull*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan bahwa: “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>13</sup>

Selain hal tersebut di atas, secara umum dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim juga perlu memperhatikan aspek dari segi sosiologis, yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara perikemanusiaan, antara lain: (1) Faktor yang memperberat, yaitu (a) Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan; (b) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya; (c) Terdakwa tidak

---

<sup>12</sup>R.A Didi Ismiatun, Hakim PN Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Kamis 7 April 2016, Pukul: 09.30 WIB.

<sup>13</sup>Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 51.

menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani persidangan; (d) Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik; (e) Tidak menyesali perbuatannya; (f) Merugikan negara yang dalam keadaan yang sedang krisis keuangan; (g) Menentang program kebijaksanaan pemerintah, (2) Faktor yang meringankan, yaitu: (a) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang; (b) Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan; (c) Menyesali telah melakukan tindak pidana; (d) Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan; (e) Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya; (f) Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung keluarga.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis disini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap atau ditemukan dalam persidangan setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, keterangan terdakwa, baik dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan maupun barang-barang bukti. Proses peradilan lebih berfokus pada pembuktian atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Bila putusan yang dibuat hakim tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta dan pasal atau hukumnya, hukum yang digunakan hakim sebagai pertimbangan, yakni berdasarkan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Bila hakim hanya mengandalkan pertimbangan yuridis saja dirasa kurang proporsional, dalam putusan tersebut pertimbangan hakim juga didasarkan atas pertimbangan sosiologis, yakni hakim lebih menekankan kepada unsur-unsur

---

<sup>14</sup>Bambang Tri Bawono, 2007, *Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*, jurnal. pdii. lipi. go. id: 2007.



yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa. Dapat dilihat, bahwa hakim juga memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sebagaimana telah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Adapun fakta yang merupakan hal meringankan terdakwa, yaitu terdakwa sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Sedangkan, pemberatan bagi terdakwa berupa sifat dari perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, terdakwa juga telah menikmati hasil kejahatannya.

Dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut tidak semata-mata bertumpu dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis, sebab apabila bertitik tolak demikian maka kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakikatnya, dengan mempertimbangkan aspek yang mengandung sifat sosiologis seperti yang meliputi keadaan diri terdakwa dan kemanfaatan bagi masyarakat sehingga diharapkan memenuhi dimensi keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, terdapat beberapa pertimbangan dari pihak keluarga, baik korban maupun pelaku, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang. Alasannya, karena selain pelaku bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh korban dan merupakan tulang punggung keluarganya, juga karena antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan keluarga yang berdampak perasaan malu jika kasus tersebut diketahui

oleh masyarakat luas. Pertimbangan lainnya, korban merasa iba dengan keadaan ekonomi pelaku yang cukup memprihatinkan.

*Kedua*, pertimbangan pihak Penyidik Kepolisian dalam hal pencabutan aduan yang dilakukan oleh pihak keluarga didasarkan atas permintaan, baik dari korban maupun pelaku dengan kesadaran bahwa masih terdapat hubungan keluarga, adanya upaya damai tersebut dianggap jauh lebih bermanfaat bila dibandingkan perkara tersebut tetap dilanjutkan. Selain itu, juga untuk mengurangi penumpukan berkas perkara yang tertunda di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar. Konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum tentu tidak dapat melakukan penuntutan atas perkara tersebut, sehingga otomatis aduan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke Pengadilan.

*Ketiga*, Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.Kray berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Adapun pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap atau ditemukan di dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan sosiologis, yakni memperhatikan aspek dari segi faktor berat-ringannya hukuman sebagaimana yang tercantum dalam bunyi dari Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

### **Saran**

*Pertama*, kepada semua pihak, guna menemukan titik temu antara para pihak, baik korban maupun pelaku, maka sebaiknya untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, yakni korban dan pelaku mengenai bagaimana sebaiknya kasus tersebut diselesaikan. Mediasi dapat juga dilakukan dengan melibatkan atau menghadirkan Perangkat Desa/Kepala Dusun setempat.

*Kedua*, kepada korban, hendaknya setiap korban tindak pidana pencurian dalam keluarga harus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai baik buruknya akibat yang akan diterima jika perkara tersebut sampai diproses ke Pengadilan.

*Ketiga*, kepada Hakim, hendaknya ketika menerapkan pertimbangan, baik yuridis maupun sosiologis yang berlandaskan pasal di dalam peraturan perundang-undangan harus lebih teliti dan adil agar tidak menimbulkan stigma negatif atau pandangan yang spekulatif terhadap penegak hukum dan keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Lamintang, P.A.F & Samosir, C. Djisman. 1990. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfa, Eva Achjani. 2013. *Gugurnya Hak Menuntut (Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Hukum Pidana II Sari Kuliah*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bawono, Bambang Tri. 2007. *Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*, Jurnal. pdii. lipi. go. id: 2007.

### **Aturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).